

ANALISIS FLYPAPER EFFECT PADA BELANJA DAERAH KOTA DAN KABUPATEN DI INDONESIA

Fachruzzaman

Eddy Suranta

Elvi Martini

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu

ABSTRACT

The aims of local autonomy is to achieve local independence funding, so that the areas can organize themselves without any central government interference. The direct implications for the implementation of the above is needed great for adequate funding. Local government's main funding source, comes from the PAD and othe PAD which is used to finance all expenditures and development. But in some of the current and multi years funding sources not only from the PAD. Local governments also get help from central government transfers such as Equalization Fund in this case is General Allocation Fund (DAU)

The aim of this research is to analyse influences of DAU and PAD's to district's spending in Indonesia. The samples of this research are taken from the budget report of Kabupaten/Kota within the Province of Sumatera and Java and used 15 province in the periode 2010-2012. Testing to all hypothesis done with SmartPLS.

The results show that DAU and PAD partially as well as collectively have indeed influenced the realisation of budget. Furthermore, we might conclude from the results that there has been a flypaper effect which is showed by the DAU which has higher ability to predict district's spending than the PAD.

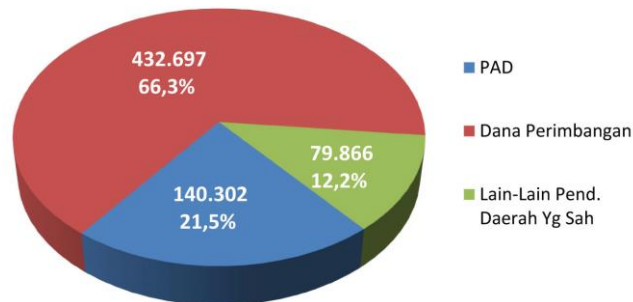
Keywords: *General Allocation Fund, Local Revenue, Regional Expenditure and Flypaper Effect*

I. PENDAHULUAN

Fenomena *flypaper effect* ini banyak sekali terjadi di negara berkembang, termasuk di Indonesia, seperti yang diungkap dalam penelitian yang dilakukan oleh Naganathan dan Sivagnan (1999) bahwa alokasi transfer di negara-negara berkembang pada umumnya lebih banyak didasarkan pada aspek belanja tapi kurang memperhatikan kemampuan pengumpulan pajak lokal. Fenomena ini membawa implikasi lebih luas, bahwa transfer dana dari pusat akan meningkatkan belanja pemerintah daerah yang lebih besar daripada penerimaan transfer itu sendiri, maupun kemampuan daerah dalam mengumpulkan pendapatan asli daerah. Menurut Kuncoro (2007) fenomena *flypaper effect* dapat terjadi dalam dua versi, (1) merujuk pada peningkatan pajak daerah dan anggaran belanja pemerintah yang berlebihan; (2) , mengarah pada elastisitas pengeluaran terhadap transfer yang lebih tinggi daripada elastisitas pengeluaran terhadap penerimaan pajak daerah.

Kebanyakan kota maupun kabupaten di Indonesia dalam menjalankan operasional daerahnya, banyak menggantungkan dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat, yaitu berupa dana perimbangan. Sedangkan pendapatan asli daerah dan pendapatan daerah yang sah lainnya belum mampu untuk membiayai belanja daerah. Hasil penemuan analisis Kementerian Keuangan Republik Indonesia tentang Deskripsi dan Analisis APBD 2013 terhadap komposisi pendapatan daerah yang terlihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 1 Komposisi Pendapatan Daerah pada Tahun 2013



Sumber : APBD 2013 (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2013 : 3)

Gambar 1 di atas menunjukkan bahwa Dana Perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat mencapai 60% lebih dalam membiayai operasional daerah dibandingkan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan lain-lain daerah yang sah.

Perbedaan antar daerah baik kota maupun kabupaten dengan penghasilan atau pendapatan asli daerah yang berbeda-beda akan membuat dana transfer yang dikirim oleh pemerintah juga berbeda. Fenomena ini juga berdampak pada perkembangan ekonomi antar daerah, terutama jika dibandingkan dengan pulau Jawa. Menurut Kuncoro (2002) “perkembangan ekonomi antar daerah memperlihatkan kecenderungan bahwa provinsi di pulau Jawa pada umumnya mengalami perkembangan ekonomi yang lebih cepat dibandingkan dengan provinsi lainnya di luar Pulau Jawa”. Ketua DPR RI Marzuki Alie dalam rangka pembahasan RUU APBN 2014, DPD RI memberikan beberapa pertimbangan yang berkaitan dengan pembangunan daerah, antara lain selama kurun waktu 2010-2013, pertumbuhan ekonomi daerah amat bervariasi. Pertumbuhan ekonomi rata-rata selama 2010-2013 dari daerah-daerah kaya sumber daya alam amat rendah, jauh dibawah rata-rata nasional, seperti yang terjadi di beberapa daerah, yang angka inflasinya lebih tinggi dari pertumbuhan ekonominya”. ([http://www.suarapembaruan.com / home/ ketua-dpr-ingatkan -presiden-soal-ketimpangan -pembangunan/ 40151](http://www.suarapembaruan.com/home/ketua-dpr-ingatkan-presiden-soal-ketimpangan-pembangunan/40151))

Berdasarkan fenomena tersebut bahwa masih banyaknya ketimpangan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah yang sangat bervariasi. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor PAD dan kredibilitas dalam penggunaan anggaran masing-masing daerah. Dari fenomena ini tampak sekali bahwa ada perbedaan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan antara kota dan daerah yang ada di Pulau Jawa dengan kota dan daerah yang ada di pulau-pulau lainnya. Menurut Halim (2006) bahwa Pemda kabupaten/kota di Jawa memiliki kemampuan keuangan berbeda dengan Pemda kabupaten/kota di luar Jawa-Bali. Pulau Sumatera adalah pulau yang berada di sebelah barat kepulauan di Indonesia yang memiliki karakteristik ekonomi dan geografis yang berbeda dengan pulau Jawa. Keadaan yang berbeda ini membuat peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh DAU dan PAD terhadap belanja daerah antara pemda kota/kabupaten yang ada di pulau Sumatera dengan yang ada di pulau Jawa.

Kuncoro (2007) menyebutkan bahwa PAD hanya mampu membiayai belanja daerah paling besar 20% saja. Kenyataan inilah yang menimbulkan perilaku asimetris pada pemerintah daerah, fakta di atas memperlihatkan bahwa perilaku fiskal pemerintah daerah dalam merespon transfer dari pusat menjadi tekanan yang penting dalam menunjang efektifitas kebijakan. Dari data dan fenomena di atas sudah tentu akan berdampak pada besaran dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat ke daerah akan berbeda, dan fenomena ini akan memberikan dampak terjadinya kondisi *flypaper effect* yang berbeda pula. Hal inilah yang menjadi daya tarik peneliti untuk mengkaji penelitian ini dan

mengetahui perbedaan *flypaper effect* Kota dan Kabupaten di Kabupaten/Kota yang ada di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa.

Berdasarkan fenomena di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian Analisis *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah Kota dan Kabupaten di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa (Studi Analisis Laporan APBD Tahun 2010 dan 2012).

II. KAJIAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Dana Alokasi Umum

Pengertian Dana Alokasi Umum (DAU) berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Besaran dana alokasi umum yang diberikan oleh pemerintah ditentukan atas dasar besar kecilnya celah fiskal (*fiskal gap*) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*). Hal ini sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004. Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi DAU relatif kecil. Sebaliknya, daerah yang potensi fiskalnya kecil, namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi DAU relatif besar. Secara implisit, prinsip tersebut menegaskan fungsi DAU sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal.

Penghitungan Dana Alokasi Umum menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah sebagai berikut :

$$\text{DAU} = \text{Celah Fiskal} + \text{Alokasi Dasar}$$

Keterangan :

DAU	= Dana Alokasi Umum
Celah Fiskal	= Kebutuhan Fiskal – Kapasitas Fiskal daerah
Alokasi Dasar	= Perhitungan gaji pegawai negeri sipil daerah

Tujuan umum dari Dana Alokasi Umum adalah untuk : 1) meniadakan dan meminimumkan ketimpangan *fiscal vertical*; 2) meniadakan dan meminimumkan ketimpangan *fiscal horizontal*; 3) menginternalisasikan/memperhitungkan sebagian atau seluruh limpahan manfaat/biaya kepada daerah yang menerima limpahan manfaat tersebut; 4) sebagai bahan edukasi bagi pemerintah daerah agar secara intensif menggali sumber-sumber penerimaannya, sehingga hasil yang diperoleh menyamai bahkan melebihi kapasitasnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah pada Pasal 1 angka 18 dinyatakan bahwa “ Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah (Halim, 2002 : 96). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, bahwa Pendapatan Asli Daerah berasal dari:

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Penerimaan dari dinas dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Flypaper Effect

Sudrajat (2010) menyatakan bahwa *flypaper effect* merupakan suatu kondisi pada saat pemerintah daerah merespon berbeda (lebih boros) dalam menentukan belanja daerah dengan mendasarkan pada transfer dari pemerintah pusat dibandingkan dengan pendapatan asli daerahnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah menunggu alokasi DAU yang diperolehnya sebelum menentukan berapa besar belanja yang akan dihabiskannya, sehingga belanja periode mendatang cenderung lebih besar jumlahnya. Dalam Inman (2008) dikemukakan bahwa *Flypaper Effect* merupakan kondisi dimana transfer dari pemerintah pusat secara signifikan meningkatkan belanja publik jika dibandingkan dengan pendapatan daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Prakosa (2004) menyatakan bahwa besarnya belanja daerah ditentukan oleh besarnya dana alokasi umum yang diterima. Dalam model prediksi, pemerintah daerah lebih bertumpu pada DAU daripada PAD dalam menentukan belanja daerah periode ke depan. Dengan demikian daya prediksi DAU terhadap belanja daerah lebih tinggi daripada daya prediksi PAD terhadap belanja daerah.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah

DAU dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dimaksudkan untuk menutup kesenjangan fiskal dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat. DAU merupakan sumber penerimaan daerah yang paling besar. Setiap transfer DAU yang diterima daerah akan ditunjukkan untuk belanja pemerintahan daerah, maka tidak jarang apabila pemerintah daerah menetapkan rencana daerah secara pesimis dan rencana belanja cenderung optimis supaya transfer DAU yang diterima daerah lebih besar (www.Balipost.co.id)

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2010) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap alokasi belanja daerah. Pemerintah Daerah yang memiliki PAD dan DAU tinggi maka pengeluaran untuk alokasi belanja daerahnya juga semakin tinggi. Frizawati (2012) yang menguji pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja daerah serta menguji *flypaper effect* pada Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan dan menemukan bukti bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan pada level 1%. Koefisien dari variabel DAU sebesar 0,473 dan koefisien DAU yang dihasilkan dari hasil regresi lebih besar daripada koefisien regresi untuk variabel PAD. Dengan demikian hipotesis dalam penelitian ini:

H1: Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh terhadap Belanja Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan yang penting bagi suatu daerah dalam memenuhi belanjanya. Pendapatan Asli Daerah ini sekaligus dapat menunjukkan bahwa mandiriya suatu daerah dalam mencukupi kebutuhan belanjanya. Semakin banyak Pendapatan Asli Daerah yang dimiliki, akan semakin memungkinkan bagi daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanja daerahnya, tanpa harus bergantung lagi pada pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah ini merupakan salah satu pendapatan selain pendapatan yang lain, yang menopang untuk kebutuhan belanja daerah. Karena semakin banyak Pendapatan Asli Daerah akan semakin banyak pula anggaran belanja daerahnya. Pendapatan Asli Daerah memiliki peran yang cukup signifikan di dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintah dan program-program bagi pembangunan daerah.

Penelitian Edison (2009) menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Toba Samosir dan ditemukan bukti bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Hasil penelitian yang dilakukan

Rahmawati (2010) bahwa Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap alokasi belanja daerah. Beberapa penelitian lain tentang pengaruh pendapatan daerah yang pernah dilakukan oleh Syukriy dan Halim (2003) dan Prakosa (2004), menyatakan pendapatan akan mempengaruhi anggaran belanja daerah.

Berdasarkan hasil penelitian di atas telah menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan yang penting bagi suatu daerah di dalam memenuhi kebutuhan belanjanya. Pendapatan Asli Daerah ini juga sekaligus menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. Berdasarkan pemikiran di atas, hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H2: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah

Kota dan Kabupaten di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa Mengalami *Flypaper Effect*

Fenomena *flypaper effect* ini merupakan suatu kondisi dimana suatu daerah merespon belanja daerah lebih banyak dengan menggunakan dana transfer berupa DAU dan DAK dari pemerintah daripada menggunakan kemampuan sendiri. Kondisi *flypaper effect* ini dialami oleh berbagai daerah di Indonesia, karena pemerintah daerah menganggap suatu dana yang berlebih dalam satu tahun berjalan harus habis, meskipun terkadang tidak jelas peruntukannya, sehingga terkesan bahwa pemerintah daerah mempunyai anggaran belanja yang besar. Hal ini dapat disebabkan oleh ketidakefisienan pemakaian anggaran, sifat pemborosan pada aparat pemerintah daerah, yang seharusnya diperuntukkan bagi pemenuhan kesejahteraan dan layanan publik hanya sedikit yang tercapai programnya. Pada akhirnya, banyak daerah mengalami fenomena *flypaper effect*. Berdasarkan dari hasil penelitian dan fenomena yang terjadi, dikembangkan hipotesis dalam penelitian ini:

H3: Terjadi fenomena *flypaper effect* untuk Kota dan Kabupaten di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa.

III. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini menggambarkan secara deskriptif dari data-data laporan keuangan yang merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan APBD dalam kurun waktu 2010 hingga tahun 2012 dari situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan atau www.djpk.depkeu.go.id.

Sampel Penelitian

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, karena data jumlah kota dan kabupaten yang terilis Laporan APBD dari tahun 2012-2013 mengalami perubahan jumlah, terutama di Pulau Sumatera seiring terjadinya pemekaran wilayah. Untuk lebih spesifik lagi, sampel yang diambil adalah Kota dan Kabupaten yang memiliki Pendapatan Asli Daerah di bawah Rp 1 triliun. Sampel diambil dari kota/kabupaten di Pulau Sumatera yang berjumlah 156 dan kota/kabupaten di Pulau Jawa yang berjumlah 113.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

1. *Flypaper Effect* adalah suatu kondisi di mana koefisien regresi Dari DAU tahun sebelumnya lebih besar dari koefisien PAD tahun sebelumnya terhadap Total Belanja Daerah tahun berjalan (Afriawati, 2012)
2. Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antara daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. (Pasal 1 ayat 21 UU Nomor 33 Tahun 2004, 2004 : 4)

Dana alokasi umum dalam penelitian ini merupakan variabel independen, yang merupakan angka realisasi DAU Pemerintah Daerah Kota maupun Kabupaten di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa pada tahun anggaran 2010-2012 dengan nominal mata uang Rupiah.

3. Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 ayat 18 UU Nomor 33 Tahun 2004, 2004: 4) Pendapatan Asli Daerah ini merupakan salah satu variabel independen, dan merupakan angka realisasi PAD pemerintah daerah Kota maupun Kabupaten di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa pada tahun anggaran 2003-2012 dengan nominal mata uang Rupiah.
4. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih (Permendagri Nomor 21 Tahun 2011). Dalam penelitian ini merupakan variabel dependen, yang merupakan angka realisasi belanja daerah baik tingkat Kota maupun Kabupaten di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa pada tahun anggaran 2010 -2012 dengan nominal mata uang Rupiah.

Metode Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan SmartPLS. Pertimbangan peneliti dalam menggunakan *Partial Least Square* (PLS) karena dapat digunakan untuk melakukan konfirmasi teori (*theoretical testing*) dan merekomendasikan hubungan yang belum ada dasar teorinya (*eksploratori*). PLS dapat menganalisis sekaligus mengkonstruksi yang dibentuk dengan indikator reflektif dan indikator formatif. Dalam penelitian ini, *financial leverage*, profitabilitas, jumlah segmen dan jenis industri merupakan variabel yang bersifat *observe*. Semua variabel dibuat menjadi variabel laten dengan satu indikator yang bersifat formatif. Model analisis jalur semua variabel laten dalam PLS terdiri dari tiga set hubungan yaitu: *Inner model*, *Outer model* dan *Weight relation* (Ghozali, 2013).

IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Uji Normalitas Data

Tabel 1
Hasil Transformasi Data untuk Pengujian Normalitas Data
Dengan Menggunakan One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Variabel	Kolmogorov-Smirnov Z	Asymp. Sig. (2-tailed)	Keterangan
LNBelanja	1,139	0,149	Normal
LNDAU	0,919	0,367	Normal
LNPAD	0,840	0,481	Normal

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2014

Hasil pengujian normalitas data selanjutnya setelah dilakukan transformasi data untuk variabel Pendapatan Asli Daerah (LNPAD) juga menunjukkan variabel PAD terdistribusi secara normal. Hal ini dapat dilihat dari nilai *Kolmogorov-Smirnov Z* dengan nilai 0,40 dan *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,481 ($\alpha > 5\%$). Dengan melakukan transformasi data melalui *natural logarithma* (LN) dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel telah terdistribusi secara normal sehingga untuk pengujian seluruh hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, menggunakan data yang telah di transformasi dalam bentuk *natural logarithma* (LN).

Pengujian Model

Pengujian Hipotesis Pertama

Pengujian hipotesis pertama ditujukan untuk menguji pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera dan Jawa dimana pengaruh DAU terhadap belanja daerah adalah positif. Hasil pengujian hipotesis satu

disajikan pada tabel 2. Berdasarkan hasil pengujian yang disajikan pada tabel 2, pengujian terlebih dahulu dilakukan secara bersama-sama dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengujian selanjutnya dilakukan secara parsial dengan cara melakukan pengujian hanya menggunakan DAU tanpa menambah PAD baik untuk seluruh periode pengamatan maupun pengujian yang dilakukan pada setiap tahunnya.

Pengujian yang dilakukan secara simultan dari DAU dan PAD terhadap dependennya (belanja daerah), menunjukkan nilai koefisien *original estimate* positif sebesar 0,430 dengan nilai t-Statistik sebesar 2,809. Pengujian selanjutnya yang dilakukan secara parsial untuk seluruh periode pengamatan maupun per tahun selama periode pengamatan atas variabel DAU menghasilkan nilai koefisien yang positif sebesar 0,773 dengan nilai t-hitung sebesar 57,838 untuk seluruh periode pengamatan (Tahun 2010-2012), pengujian DAU terhadap belanja dengan menggunakan tahun 2010 menghasilkan nilai koefisien yang positif sebesar 0,770 dan dengan nilai t-hitung sebesar 20,690, untuk pengujian menggunakan periode pengamatan pada tahun 2011, koefisien yang dihasilkan dari pengujian untuk DAU adalah positif sebesar 0,7310 dan nilai t-hitung sebesar 5,06 serta untuk pengujian terakhir dengan menggunakan periode pengamatan pada tahun 2012, koefisien regresi yang dihasilkan adalah positif sebesar 0,785 dengan nilai t-hitung sebesar 6,137.

Tabel 2
Hasil Pengujian Hipotesis Pertama

Pengujian Model DAU dan PAD Secara Keseluruhan					
Variabel	Original sample estimate	Mean of subsamples	Standard deviation	T-Statistic	T-Tabel
LND AU -> LNBELANJA	0.430	0.613	0.153	2.809	1.96
LNPAD -> LNBELANJA	0.547	0.393	0.130	4.202	
DAU SELURUH TAHUN (2010-2012)					
LND AU -> LNBELANJA	0.773	0.908	0.013	57.838	1.96
DAU TAHUN 2010					
LND AU -> LNBELANJA	0.770	0.750	0.037	20.690	1.96
DAU TAHUN 2011					
LND AU -> LNBELANJA	0.731	0.742	0.142	5.16	1.96
DAU TAHUN 2012					
LND AU -> LNBELANJA	0.785	0.749	0.150	6.137	1.96

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2014

Hasil pengujian yang disajikan pada tabel 2 di atas baik secara simultan maupun secara parsial untuk keseluruhan tahun maupun pengujian untuk setiap tahunnya dimana koefisien yang dihasilkan dari pengujian adalah positif dan seluruh nilai t-hitung lebih besar dari nilai t-tabelnya (t-tabel sebesar 1,96) sehingga pengujian hipotesis satu yang menyatakan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap belanja daerah diterima. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa semakin besar DAU maka semakin besar pula belanja daerah. Penelitian ini konsisten dengan beberapa penelitian sebelumnya yang telah membuktikan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah (Holtz Eakin *et. al.*, 1994; Syukri dan Halim, 2004; Maimunah, 2005; Masdjojo dan Sukartono, 2009; Syahputra, 2010; Afrizawati 2012 dan Junaidi, 2012).

Pengujian Hipotesis Kedua

Pengujian yang dilakukan pada hipotesis kedua ditujukan untuk menguji pengaruh positif dari Pendapatan Asli daerah terhadap belanja daerah. Hipotesis yang menyatakan bahwa pendapatan daerah (terutama pajak) akan mempengaruhi anggaran belanja pemerintah daerah dikenal dengan nama *tax spend hypothesis* (Aziz *et. al.*, 2000; Doi, 1998; Von Furstenberg *et. al.*, 1986). Dalam hal ini pengeluaran pemerintah daerah akan disesuaikan dengan perubahan dalam penerimaan pemerintah daerah atau perubahan pendapatan terjadi sebelum perubahan pengeluaran. Pengujian hipotesis kedua disajikan pada tabel 3.

Hasil pengujian dengan menggunakan PLS yang disajikan pada tabel 3 di bawah ini dimana pengujian terlebih dahulu dilakukan secara bersama-sama dengan Dana Alokasi Umum (DAU) dan pengujian selanjutnya dilakukan secara parsial dengan cara melakukan pengujian hanya menggunakan PAD tanpa memasukkan DAU baik untuk seluruh periode pengamatan maupun pengujian yang dilakukan pada setiap tahunnya.

Tabel 3
Hasil Pengujian Hipotesis Kedua

Pengujian Model DAU dan PAD Secara Keseluruhan					
	<i>Original sample estimate</i>	<i>Mean of subsamples</i>	<i>Standard deviation</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>t-Tabel</i>
LND AU -> LNBELANJA	0.430	0.613	0.153	2.809	1.96
LNPAD -> LNBELANJA	0.547	0.393	0.130	4.202	
PAD SELURUH TAHUN (2010-2012)					
LNPAD -> LNBELANJA	0.817	0.818	0.011	75.999	1.96
PAD TAHUN 2010					
LNPAD -> LNBELANJA	0.830	0.843	0.032	26.000	1.96
PAD TAHUN 2011					
LNPAD -> LNBELANJA	0.796	0.810	0.031	25.701	1.96
PAD TAHUN 2012					
LNPAD -> LNBELANJA	0.816	0.808	0.020	41.558	1.96

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2014

Pengujian yang dilakukan secara simultan dari DAU dan PAD terhadap variabel dependennya (belanja daerah), menunjukkan PAD memiliki nilai koefisien *original estimate* positif sebesar 0,547 dengan nilai t-Statistik sebesar 4,202. Pengujian selanjutnya yang dilakukan secara parsial untuk seluruh periode pengamatan maupun per tahun selama periode pengamatan atas PAD untuk tahun 2010-2012 menghasilkan nilai koefisien yang positif sebesar 0,817 dengan nilai t-hitung sebesar 75,999 untuk seluruh periode pengamatan (Tahun 2010-2012), pengujian PAD terhadap belanja dengan menggunakan tahun 2010 menghasilkan

nilai koefisien yang positif sebesar 0,890 dan dengan nilai t-hitung sebesar 26,000 untuk pengujian periode pengamatan pada tahun 2011, koefisien yang dihasilkan dari pengujian untuk PAD adalah positif sebesar 0,796 dan nilai t-hitung sebesar 25,701 serta untuk pengujian terakhir dengan menggunakan periode pengamatan pada tahun 2012, koefisien regresi yang dihasilkan dari PAD adalah positif sebesar 0,816 dengan nilai t-hitung sebesar 41,558.

Hasil pengujian yang disajikan pada tabel 3 di atas baik secara simultan maupun secara parsial untuk keseluruhan tahun maupun pengujian untuk setiap tahunnya dimana koefisien yang dihasilkan dari pengujian adalah positif dan seluruh nilai t-hitung lebih besar dari nilai t-tabelnya (t-tabel sebesar 1,96) sehingga pengujian hipotesis kedua yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah diterima. Dengan demikian hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin besar Pendapatan Asli Daerah maka semakin besar pula belanja daerah pemerintah daerah tersebut.

Pengujian Hipotesis Ketiga

Pengujian hipotesis ketiga untuk mengetahui apakah terjadi fenomena *flypaper effect* atas belanja daerah dari Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa dan hasil pengujian disajikan pada tabel 4 di bawah ini.

Pengujian secara simultan untuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk tahun sebelumnya (2010-2011) terhadap Belanja Daerah periode berjalan (2011-2012) untuk seluruh periode pengamatan menunjukkan koefisien DAU yang ditunjukkan oleh nilai *original sample estimate* sebesar 0,567 dan nilai t-Statistik sebesar 3,367. Koefisien yang positif dari DAU menjelaskan bahwa semakin besar DAU maka akan semakin besar jumlah Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera dan Jawa. Untuk membuktikan kekonsistenan hasil dari koefisien DAU periode sebelumnya terhadap belanja daerah tahun berjalan, pengujian selanjutnya dilakukan per tahun dan hasil pengujian menunjukkan nilai *original sample estimate* untuk variabel DAU pada tahun 2010 dan belanja daerah tahun 2011 adalah positif sebesar 0,500 dengan nilai t-Statistik sebesar 3,278 dan hasil pengujian untuk tahun 2011 dari variabel Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja daerah tahun 2012 menunjukkan koefisien sebesar 0,571 dengan nilai t-Statistik sebesar 3,705. Hasil pengujian selanjutnya menunjukkan bahwa variabel DAU untuk seluruh periode atau pengujian pertahun dari DAU periode sebelumnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah tahun berjalan.

Variabel Pendapatan Asli Daerah untuk periode 2010-2011 terhadap Belanja Daerah periode berjalan (2011-2012) menunjukkan koefisien sebesar 0,404 (ditunjukkan oleh nilai *original sample estimate*) dan nilai t-Statistik sebesar 1,813. Dengan melakukan pengujian per tahun, hasil pengujian untuk variabel PAD tahun sebelumnya (2010) terhadap Belanja Daerah tahun berjalan (tahun 2011) menunjukkan nilai *original sample estimate* yang positif sebesar 0,533 dengan nilai t-Statistik sebesar 4,555 dan untuk Pendapatan Asli Daerah tahun sebelumnya (2011) terhadap belanja daerah tahun 2012 menghasilkan nilai *original sample estimate* yang positif sebesar 0,511 dengan nilai t-Statistik sebesar 4,595.

Hasil pengujian yang dilakukan secara bersama-sama baik untuk seluruh periode pengamatan maupun pengujian per tahun menunjukkan bahwa koefisien dari variabel DAU terhadap belanja daerah lebih besar dari koefisien variabel PAD terhadap belanja daerah dan hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai t-Statistik untuk variabel PAD terhadap belanja lebih kecil daripada nilai t-Statistik dari variabel DAU terhadap belanja sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan belanja daerah tahun berjalan dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah tahun sebelumnya dan besarnya Dana Alokasi Umum tahun sebelumnya. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi fenomena *flypaper effect* atas belanja daerah untuk Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera dan Jawa. Terjadinya fenomena *flypaper effect* dapat dilihat dari koefisien variabel PAD yang lebih kecil daripada koefisien variabel DAU dimana fenomena *flypaper effect* terjadi jika koefisien DAU tahun

sebelumnya lebih besar dari koefisien PAD tahun sebelumnya terhadap belanja daerah tahun berjalan sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga diterima.

Tabel 4
Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga

Panel A untuk Tahun 2011-2012					
Variabel	original sample estimate	mean of subsamples	Standard deviation	T-Statistic	R-square
PADt-1 -> BELANJA	0.404	0.457	0.223	1.813	0.733
DAUt-1 -> BELANJA	0.567	0.545	0.168	3.367	
Panel B untuk Tahun 2011					
PADt-1 -> BELANJA	0.533	0.430	0.117	4.555	0.832
DAUt-1 -> BELANJA	0.500	0.519	0.153	3.278	
Panel C untuk Tahun 2012					
PADt-1 -> BELANJA	0.511	0.530	0.091	5.595	0.811
DAUt-1 -> BELANJA	0.517	0.436	0.140	3.705	
Panel D untuk Variabel PAD t-1 Untuk Tahun 2011-2012					
PADt-1 -> BELANJA	0.797	0.756	0.107	7.427	0.636
Panel E untuk Variabel PAD t-1 Untuk Tahun 2011					
PADt-1 -> BELANJA	0.812	0.783	0.074	10.989	0.659
Panel F untuk Variabel PAD t-1 Untuk Tahun 2012					
PADt-1 -> BELANJA	0.788	0.861	0.053	14.799	0.620
Panel G untuk Variabel DAU t-1 Untuk Tahun 2011-2012					
DAUt-1 -> BELANJA	0.786	0.785	0.062	12.654	0.618
Panel H untuk Variabel DAU t-1 Untuk Tahun 2011					
DAUt-1 -> BELANJA	0.797	0.796	0.068	11.643	0.636
Panel I untuk Variabel DAU t-1 Untuk Tahun 2012					
DAUt-1 -> BELANJA	0.791	0.783	0.112	7.046	0.625

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2014

Pembahasan Penelitian

Pembahasan Hipotesis Pertama

Proporsi DAU antara daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan imbalan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota. DAU atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar untuk suatu daerah provinsi dihitung berdasarkan perkalian bobot daerah provinsi yang bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh daerah provinsi merupakan perbandingan antara celah fiskal dengan provinsi yang bersangkutan dan total celah fiskal seluruh daerah provinsi. Untuk kabupaten/kota dihitung berdasarkan perkalian bobot daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh daerah kabupaten/kota. Bobot daerah kabupaten/kota merupakan perbandingan antara celah fiskal daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan total celah fiskal seluruh daerah kabupaten/kota.

Daerah yang memiliki nilai celah fiskal sama dengan nol menerima DAU sebesar alokasi dasar. Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut lebih kecil dari alokasi dasar menerima DAU sebesar alokasi dasar setelah dikurangi nilai celah fiskal. Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif tersebut sama atau lebih besar dari alokasi dasar tidak menerima DAU. Data untuk menghitung kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal diperoleh dari lembaga statistik pemerintah dan/atau lembaga pemerintah yang berwenang menerbitkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Penyaluran DAU dilaksanakan setiap bulan masing-masing sebesar 1/12 (satu perdua belas) dari DAU daerah yang bersangkutan. Penyaluran DAU dilaksanakan sebelum bulan bersangkutan

Koefisien estimasi dari variabel DAU positif dan signifikan konsisten dengan temuan dari beberapa penelitian. Hasil penelitian Rahmawati (2010) bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap alokasi belanja daerah. Pemerintah Daerah yang memiliki PAD dan DAU tinggi maka pengeluaran untuk alokasi belanja daerah juga semakin tinggi.

Pembahasan Hipotesis Kedua

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah, Koefisien estimasi yang positif berarti akan semakin besar pendapatan asli daerah yang diterima, maka semakin besar pula kewenangan pemerintah daerah tersebut dalam melaksanakan kebijakan otonomi dan akan berdampak pada peningkatan jumlah belanja daerah. Semakin banyak Pendapatan Asli Daerah yang dimiliki, akan semakin memungkinkan bagi daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanja daerahnya, tanpa harus bergantung lagi pada pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah ini merupakan salah satu pendapatan selain pendapatan yang lain, yang menopang untuk kebutuhan belanja daerah. Karena semakin banyak Pendapatan Asli Daerah akan semakin banyak pula anggaran belanja daerahnya. Pendapatan Asli Daerah memiliki peran yang cukup signifikan di dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintah dan program-program bagi pembangunan daerah. Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan Solikin (2010), Syukriy dan Halim (2003), serta Prakosa (2004).

Pembahasan Hipotesis Ketiga

Pada pengujian hipotesis ketiga untuk menguji adanya fenomena dari *flypaper effect* atas belanja daerah. Terjadinya *flypaper effect* ditunjukkan oleh nilai koefisien estimasi dari variabel DAU tahun sebelumnya yang lebih besar dari koefisien estimasi dari variabel PAD tahun sebelumnya. Hasil pengujian menunjukkan bahwa terjadi fenomena *flypaper effect* atas belanja daerah tahun berjalan dengan menggunakan data data Dana Alokasi Umum (DAU) dan PAD tahun sebelumnya. Koefisien estimasi dari variabel DAU tahun sebelumnya lebih besar dari koefisien estimasi dari variabel PAD tahun sebelumnya terhadap belanja tahun berjalan.

V. SIMPULAN, IMPLIKASI, KETERBATASAN, DAN SARAN

Simpulan

Simpulan penelitian ini sebagai berikut:

1. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah untuk Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera dan Jawa sehingga semakin besar Dana Alokasi Umum (DAU) maka akan semakin besar Jumlah Belanja Daerah.
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah untuk Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera dan Jawa sehingga semakin besar Dana Alokasi Umum (DAU) maka akan semakin besar Jumlah Belanja Daerah.
3. Terjadi fenomena *flypaper effect* atas belanja daerah pada kabupaten/kota di Pulau Sumatera dan Jawa.

Implikasi Penelitian

Implikasi penelitian ini adalah:

1. Pemerintah Daerah baik di tingkat Kabupaten maupun Kota harus berupaya terus menerus untuk meningkatkan berbagai sumber penerimaan daerah yang nantinya menjadi sumber pendanaan dalam Belanja Daerah sehingga menghilangkan kesan bahwa pemerintah daerah menunggu dana perimbangan salah satunya berupa besaran Dana Alokasi Umum yang ditransfer pemerintah pusat ke daerah karena adanya kesenjangan fiskal dalam mendanai belanja daerah.
2. Selain terus berupaya untuk meningkatkan berbagai sumber penerimaan daerah, pemerintah daerah juga berupaya untuk mengoptimalkan belanja daerah yang ada untuk meningkatkan berbagai potensi yang mampu meningkatkan penerimaan daerah di masa yang akan datang.
3. Bagi pemerintah pusat untuk lebih mempertimbangkan atas usulan pemekaran wilayah baru dimana dampak bagi pemekaran wilayah baru akan menambah beban bagi pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan jika daerah atau wilayah yang akan dimekarkan tidak memiliki potensi yang optimal dari berbagai potensi sumber penerimaan daerah sehingga wilayah yang baru dimekarkan akan sangat tergantung dari jumlah transfer dari pemerintah pusat.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yaitu:

1. Periode pengamatan hanya menggunakan periode dari Tahun 2010 sampai Tahun 2012 dan untuk tahun 2013 data yang dibutuhkan tidak tersedia seluruhnya untuk Kabupaten/Kota yang ada di Pulau Sumatera dan Jawa sehingga tahun 2013 tidak dimasukkan kedalam periode pengamatan.
2. Penelitian ini hanya menggunakan sampel Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera dan Jawa dan tidak memasukkan Kabupaten/Kota lainnya yang ada di Indonesia.
3. Penelitian ini tidak mampu membuktikan fenomena *flypaper effects*. Hal ini lebih disebabkan pada upaya penormalan data sedangkan ketika data tidak dinormalkan terbukti adanya fenomena *flypaper effect*.

Saran

Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

1. Memperluas objek dan sampel penelitian dengan menambah Kabupaten/Kota lainnya yang ada di Indonesia.
2. Penelitian selanjutnya dapat menguji terlebih dahulu beberapa faktor yang mempengaruhi besaran dari Dana Alokasi Umum dan beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota dan selanjutnya menguji pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli daerah terhadap Belanja Daerah.
3. Penelitian selanjutnya dapat melakukan pengujian secara terpisah pengaruh dari Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah dengan mengelompokkan Kabupaten/Kota berdasarkan indeks kemandirian suatu daerah.
4. Penelitian selanjutnya dapat menguji perbedaan pengaruh dari Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah dengan menggunakan regresi *chow test*.
5. Penelitian selanjutnya juga dapat menguji fenomena *flypaper effect* dengan mengelompokkan Kabupaten/Kota berdasarkan indeks kemandirian daerah yang dilakukan dengan menggunakan uji beda atau uji perbedaan pengaruh (*chow test*).
6. Penelitian selanjutnya dapat menguji fenomena *flypaper effect* tidak hanya pada total belanja daerah saja, tetapi dapat diuji dengan menggunakan beberapa belanja daerah lainnya seperti belanja modal dan belanja lainnya.

7. Penelitian selanjutnya sebaiknya mempertimbangkan masalah normalitas data karena dalam penelitian ini tidak terbukti adanya fenomena *flypaper effect* terhadap belanja daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukriy dan Abdul Halim 2006, Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan, *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, Volume 2, No.2 (November 2006): 17-32.
- Abdullah, Syukriy dan Abdul Halim 2004, Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah : Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali, *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi VI*, 16-17 Oktober 2003, Surabaya, hal 1140.
- Abdullah, Syukriy dan Abdul Halim. 2009. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali*. Yogyakarta, Hal 1140-1159.
- Afrizawati. 2012. Analisis *Flypaper Effect* Pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi (JENIUS)*, Volume 2, No. 1. Januari.
- Andirfa, Mulia. 2009. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Pemerintah Aceh). *Jurnal Akuntansi*. Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh.
- Arafat, M. Abdullah. 2011. *Kajian Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Pembangunan Daerah (Studi Kasus : Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat)*. IPB.
- Arikunto, Suharsimi., 2006. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik, Cet ke 13*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Aziz, Mariam Abdul, Muzafar Shah Habibullah, W.N.W. Azman-Saini, & M. Azali. 2000. *The causal relationship between tax revenues and government spending in Malaysia*
- Barata, Atep Adya dan Bambang Trihartanto. 2004. *Perbendaharaan dan Pemeriksaan Keuangan Negara/Daerah*. Jakarta : Excel Media Komputindo Indonesia.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik, Suatu Pengantar..* Jakarta : Salemba Empat.
- Bastian, Indra. 2008. *Akuntansi Sektor Publik, Suatu Pengantar*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Cooper, Donald R., and Pamela S.Schindler. 2006. *Metode Riset Bisnis*, Volume 1 Edisi Sembilan, Alih Bahasa Budijanto dkk, McGraw-Hill Irwin. Jakarta.
- Doi, Takero. 1998. Is Japanese local finance really centralized? From viewpoint of the revenue-expenditure nexus. University of Tokyo, *Working Paper*
- Edison, Henri H. Panggabean. 2009. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Toba Samosir*. Tesis. Medan: Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
- Erlina, Sri Mulyani. 2007. *Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Cetakan Pertama. Medan : USU Press.
- Fajrillah. 2012. *Analisis Faktor-Faktor yang Menjelaskan Dana Alokasi Umum (DAU) (Kasus : Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara)*. Medan : STT Harapan Medan.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21update PLS Regresi*. Edisi 7. Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro Semarang.
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Sektor Publik, Edisi 3*, Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- _____. 2004. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 3. Jakarta : Salemba Empat.

- _____. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta : Salemba Empat.
- Harianto, David dan Priyo Hari Adi. 2007. Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Per Kapita. *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi X*. Makassar.
- Hastuti, Indhi. 2011. Analisis Flypaper Effect Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah dan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) (Studi pada Kota dan Kabupaten Semarang). Semarang : Universitas Diponegoro.
- Holtz-Eakin, Douglas, Harvey S & Schuyley Tilly. 1994. Intertemporal Analysis of State and Local Government Spending : Theory and Tests. *Journal of Urban Economics* 35: 159 – 174.
- Indriantoro, Nur dan Bambang, Soepomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis: untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Indah, Nur Rahmawati. 2010. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Alokasi Belanja Daerah*. Skripsi. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Inman, Robert. 2008. The Flypaper Effect. *Working Paper No. 14579*, National Bureau of Economic Research.
- Isdjoso, Brahmantio. 2002. *Analisis Kebijakan Fiskal Pada Era Otonomi Daerah (Studi Kasus di Sektor Pendidikan Kota Surakarta)*.
- Junaidi. 2014. Asimetri pada *Flypaper Effect*: Bukti Empiris Pemanfaatan Dana Alokasi Umum pada Pemerintah Daerah di Indonesia . *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 14, No. 1, Mei 2012: 45-55.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2013. Deskripsi dan Analisis APBD 2013. Jakarta : Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah.
- Koswara, E. 2001. *Otonomi Daerah Untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat*. Jakarta : Pariba.
- Kuncoro, Haryo. 2007. Tinjauan Literatur Ekonomi Politik Pengaruh Transfer pada Kinerja Keuangan Sektor Publik. *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi X*, UNHASMakasar, 26-28 Juli 2007.
- Kuncoro, M. 2003. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis*. Jakarta : Erlangga.
- Lambut, Kristanto Adventinus dkk. 2013. Analisis Flypaper Effect pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing*, Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi UNSRAT, Vol 4 Nomor 1, Juni 2013.
- Maimunah, Mutiara. 2006. Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten atau Kota di Pulau Sumatera. *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi 9*, Padang 23-26 Agustus 2006.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Good Governance*. Yogyakarta. Penerbit Andi.
- Masdjoko, Gregorius N dan Sukartono. 2009. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah serta Analisis *Flypaper Affect* Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2006-2008. *TEMA Telaah Manajemen*, Vol. 6, Edisi 1, Maret.
- Mulyana, Budi, Subkhan dan Kuwat Slamet. 2006. *Keuangan Daerah Perspektif Desentralisasi Fiskal dan Pengelolaan APBD di Indonesia*. Jakarta : LPKPAP.
- Naganathan, M. dan K.J. Sivagnanam, (1999), Federal Transfers and Tax Efforts of States in India, *Indian Economic Journal*, 47(4), April: 101-110.
- Ndadari, Laras Wulan dan Adi, Priyo Hari. 2008. Perilaku Asimetris Pemerintah Daerah Terhadap Transfer Pemerintah Pusat. *The 2nd National Conference UKWMS*. Surabaya.

- Nawawi, Hadari. 2003. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Nordiawan, Deddi. 2008. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.
- Oates, Wallace E. 1999. An Essay on Fiscal Federalism. *Journal of Economic Literature*, Vol XXXVII (September 1999) pp. 1120-1149.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta : Kementerian Dalam Negeri.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. Tentang Perubahan atas Peraturan menteri dalam negeri nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
- Prakosa, Bambang. 2004. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Wilayah Jawa Tengah dan DIY). *JAAI*. Vol 8 No. 2.
- Pratiwi, Novi. 2007. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Indonesia. Skripsi (dipublikasikan) Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta.
- Puspitawati, Chairunnisa. 2013. *Analisis Komparasi Flypaper Effect pada Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tinggi dan Rendah dengan Metode Elastisitas (Studi Kasus Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat)*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Rahmawati, Nur Indah. 2010. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Belanja Daerah*.
- Republik Indonesia, Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengurusan keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Rokhaniyah, Siti dan Muh Rudi Nugroho. 2011. Analisis Flypaper Effect pada Belanja Pemerintah Kota dan Kabupaten di Indonesia Tahun 2006-2008. *Jurnal 100 Fokus Ekonomi (FE)*, Vol. 10 No. 2, Agustus 2011, Hal 100 – 113.
- S, Santoso. 2007. *Buku Latihan SPSS Paramterik*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*. Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia.
- Sasana, Hadi. 2011. Analisis Determinan Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat dalam Era Otonomi dan Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, Vol. 18, No. 1, hal. 46-58.
- Sayekti, Moh. Rofii Adji. 2008. *Peran Masyarakat dalam Otonomi Daerah*. Klaten: Cempaka Putih.
- Siahaan, Marihot P. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Sidik, Machfud. 2002. *Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal*. Makalah Seminar Setahun Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah di Indonesia, Yogyakarta 13 Maret 2002.
- Simanjuntak, Oloan. 2003. *Hukum Pajak*. Medan : Nomensen Press.
- Sudrajat. 2010. Fenomena *Flypaper Effect* Pada Kabupaten/Kota di Propinsi Lampung. *Jurnal ESAI* Vol. 4 No. 3, Juli 2010.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D.*, Cetakan ke 6. Bandung : Alfabeta.
- Sukriy dan Halim. 2003. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah : Studi Kasus

- Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali, *Proceding Simposium Nasional Akuntansi VI* : 1140-1159. Surabaya 16-17 Oktober 2003.
- Syahputra, Indra Lubis. 2010. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara*. Tesis Program Pascasarjana Ekonomi USU, Medan.
- Tunbull, G.K. 1998. The Overspending and Flypaper Effect of Fiskal Illusion: Theory and Empirical Evidence. *Journal of Urban Economics* 44
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. *Tentang Jenis-jenis Pajak Daerah*
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. *Tentang Pemerintahan Daerah*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 *Tentang Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Von Furstenberg, George M,R. Jeffery Green & Jin-Ho Jeong, 1986, Tax and spend, or spend and tax?, *The review of Economics and statistic* 67: 33-40.
- ([http://www.suarapembaruan.com / home/ ketua-dpr-ingatkan -presiden-soal-ketimpangan -pembangunan/ 40151](http://www.suarapembaruan.com/home/ketua-dpr-ingatkan-presiden-soal-ketimpangan-pembangunan/40151)).
- <http://www.dpjk.depkeu.go.id> (<http://keuda.kemendagri.go.id/artikel/detail/41-belanja-modal-pemda-harus-capai-30-persen>).
- <http://www.Balipost.co.id>